

**TESIS**

**KEMENANGAN SYAMSARI KITTA – ACHMAD DAENG SE'RE YANG  
DIDUKUNG OLEH KOALISI PARTAI POLITIK KECIL  
PADA PILKADA TAKALAR TAHUN 2017**

Disusun dan diajukan oleh  
**Andi Anisar**  
P4300216301

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal **10 Januari 2019**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Disetujui oleh  
Komisi Penasehat

Ketua Penasehat,

Anggota Penasehat,



**Prof. Dr. Armin Arsyad, M. Si.**



**Dr. Muhammad Saad, MA.**

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Politik,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik,



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



**Muhammad, S.IP., M. Si.**



**Prof. Dr. Armin Arsyad, M. Si.**

**KEMENANGAN SYAMSARI KITTA – ACHMAD DAENG  
SE'RE YANG DIDUKUNG KOALISI PARTAI POLITIK KECIL  
PADA PILKADA TAKALAR  
TAHUN 2017**

**VICTORY OF SYAMSARI KITTA – ACHMAD DAENG SE'RE  
SUPPORTED BY THE COALITION OF SMALL  
POLITICAL PARTIES IN 2017 TAKALAR ELECTION**



**TESIS**

**ANDI ANISAR  
P4300216301**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



**KEMENANGAN SYAMSARI KITTA – ACHMAD DAENG  
SE'RE YANG DIDUKUNG KOALISI PARTAI POLITIK KECIL  
PADA PILKADA TAKALAR  
TAHUN 2017**

**Tesis**

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister pada  
Program Studi Ilmu Politik

Disusun dan Diajukan Oleh :

**ANDI ANISAR  
P 4300 216 301**

**PROGRAM STUDI ILMUPOLITIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## TESIS

### KEMENANGAN SYAMSARI KITTA – ACHMAD DAENG SE'RE YANG DIDUKUNG KOALISI PARTAI POLITIK KECIL PADA PILKADA TAKALAR TAHUN 2017

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI ANISAR  
Nomor Pokok P4300216301

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 10 Januari 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat

**Prof.Dr.Armin Arsyad,M.Si.**  
Ketua

**Dr.Muhammad Saad,MA**  
Anggota

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Hasanuddin



**ad, S.IP.,M.Si.**

**Prof.Dr.Armin Arsyad, M.Si.**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI ANISAR**

Nomor Pokok : **P4300216301**

Program Studi : **Ilmu Politik**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan dan pemikiran karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, Januari 2019

Yang Menyatakan

**ANDI ANISAR**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga karya ilmiah yang berjudul “Kemenangan Syamsari Kitta – Achmad Daeng Se’re yang didukung koalisi partai politik kecil pada Pilkada Takalar Tahun 2017” akhirnya terselesaikan dengan baik.

Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.Armin Arsyad, M.Si selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Muhammad Saad, MA selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dengan segala ketulusan dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini serta atas ilmu yang diberikan selama masa studi pada Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis pun menyadari selesainya tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan, motivasi semangat dan do’a dari beberapa pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Muhammad, S.IP.,M.Si, Bapak Dr.Jayadi Nas, S.Sos.,M.Si., Bapak Dr.Sukri,SIP.,M.Si. selaku penguji yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna sehingga makin memperkaya analisis tesis ini;



tercinta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang erikan beasiswa kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan

ke jenjang magister.

3. Bapak/ Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin atas ilmu yang diberikan selama masa studi.
4. Bapak/ Ibu Komisioner KPU Kabupaten Takalar atas perkenan waktu untuk wawancara dan diskusi.
5. Ayahanda tercinta Drs.Haji Andi Nurdin, Mama Juni dan adek-adekku Ikrar, Rangga,dan Fathur atas dukungan moril dan materi serta semangat yang tidak pernah berhenti.
6. Bunda Asniati Muin,S.IP.,M.Si dan Adindaku Ismainar Ismail yang selama ini memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Terima kasih atas kebersamaannya kepada teman-teman seperjuangan Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Angkatan 2016 yang saya banggakan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Sahabatku Mega Yabes Ratte Lembang, Mas Wijaya, Mbak Erna, Mbak Anria, Mbak Awie, Mbak Fira, Arie, Bang Ovel, Bang Mahbub, Bang Jay, Kak Irwan, Arta, Iccang, dan adinda-adindaku konsentrasi politik lokal adindaku Fatma, Nisa, Wulan Halid, Umi, Icha, Wahyu, Kafrawi, Paul, Frans, Jhames, Akmal, Fikar, Rival. Semoga Allah SWT tetap memberi kesempatan bagi kita semua untuk tetap bersilaturahmi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan karena

tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan karena itu

selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari



berbagai pihak .

Sekian.

Makassar, Januari 2018

**Penulis**



## ABSTRAK

**ANDI ANISAR.** *Kemenangan Syamsari Kitta – Achmad Daeng Se're yang didukung Koalisi Partai Politik Kecil pada Pilkada Takalar Tahun 2017 (dibimbing oleh Armin Arsyad dan Muhammad Saad).*

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang menyebabkan kandidat yang diusung oleh koalisi partai politik kecil mengalahkan kandidat yang diusung oleh koalisi partai politik besar pada Pilkada Takalar Tahun 2017.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh baik melalui data primer (wawancara) maupun data sekunder. Dalam penelitian ini juga digunakan teori koalisi partai politik William Riker, teori sumber daya minimum oleh Ghamson dan teori strategi politik Peter Schroder sebagai landasan analisisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kandidat yang didukung oleh koalisi partai politik kecil mengalahkan kandidat yang didukung oleh koalisi partai politik besar pada Pilkada Takalar Tahun 2017 bahwa pertama, strategi yang dilakukan partai pengusung Syamsari Kitta-Achmad Daeng Se're melawan koalisi partai politik besar yang dimiliki Burhanuddin Baharuddin – Natsir Ibrahim adalah strategi internal. Strategi jenis ini difokuskan untuk membenahan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tubuh partai politik. Pembenahan internal ini ditujukan untuk menghindari potensi konflik dalam tubuh partai yang menyebabkan perpecahan dan tidak solid. Kedua, strategi tim pemenangan pengusung Syamsari Kitta- Achmad Daeng Se're melawan koalisi partai politik besar yang dimiliki Burhanuddin Baharuddin - Natsir Ibrahim menggunakan marketing politik yang menyangkut ,(1)figur kandidat, (2) program atau kebijakan yang ditawarkan. Ketiga, keterlibatan elite berpengaruh pada Pilkada Takalar Tahun 2017 Syahrul Yasin Limpo, Rusdi Masse, Tenri Olle Yasin Limpo dianggap sebagai salah satu faktor kemenangan Syamsari Kitta - Achmad Daeng Se're.

Kata kunci : Koalisi, Partai Politik, Pilkada, Petahana.



## ABSTRACT

**ANDI ANISAR.** Victory of Syamsari Kitta – Achmad Daeng Se're Supported by the coalition of Small Political Parties in 2017 Takalar Election. (Supervised by Armin Arsyad and Muhammad Saad).

The aims of the study were to find out and analyze factors that caused candidates has been supported by a coalition of major political parties in the 2017 Takalar Regional Election.

The research was a qualitative descriptive. Data were primary data obtained with interview, and secondary data. The study also used coalition theory of William Riker's political party, Ghamson's minimum theory of resources and Peter Schroder's political strategy theory as the basic of this analysis.

The results showed that the factors causing candidates has been supported by a coalition of small political parties defeated candidates with a coalition of major political parties in Takalar regional election in 2017 were: (1) the strategy implemented by Syamsari Kitta – Achmad Daeng Se're, against a coalition of major political parties of Burhanuddin – Natsir Ibrahim, was an internal strategy. This strategy is focused on improving the effectiveness and efficiency of political parties. This internal reform is intended to avoid potential conflicts ini the party which causes segregation; (2) the winning team uses political marketing which involves three things, that is the candidate figure, the programs or policies offered, and geopolitics; (3) the involvement of influential elite Syahrul Yasin Limpo.

Keywords: Coalitions, Political Party, Regional Election, Incumbent.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. 1. Latar Belakang .....	1
1. 2. Rumusan Masalah .....	11
1. 3. Tujuan Penelitian .....	12
1. 4. Manfaat Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2. 1. Pemahaman Tentang Partai Politik .....	13
2. 2. Teori Koalisi Partai Politik Ala William Riker.....	19
2. 3. Teori Strategi Politik Ala Peter Schroder .....	32
2. 4. Penelitian Terdahulu.....	45
2. 4. Kerangka Pemikiran .....	53
METODELOGI PENELITIAN .....	55
Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	55
Lokasi Penelitian .....	56



3. 3.Penetapan Informan.....	56
3. 4.Jenis Data .....	57
3. 5.Teknik Pengumpulan Data .....	58
3. 6.Analisis Data .....	61
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	<b>63</b>
4. 1.Partai Pengusung SK-HD.....	63
4. 2.Profil Syamsari Kitta.....	77
4. 3. Profil Achmad Daeng Se're.....	78
4. 4.Visi-Misi SK-HD.....	79
4. 5.Visi- Misi BUR- NOJENG.....	80
4. 6.Program Unggulan SK-HD.....	80
4. 7.Program Unggulan BUR-NOJENG.....	81
4. 8.Perbandingan Kursi di Parlemen Partai Usungan Calon..... di Kabupaten Takalar	82
4. 9. Perolehan Suara Pilkada Takalar Tahun 2017.....	83
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>86</b>
5. 1. Faktor yang Menyebabkan Kandidat yang diusung..... Koalisi Partai Politik Kecil Mengalahkan Kandidat yang diusung Koalisi Partai Politik Kecil pada Pilkada Takalar Tahun 2017.	86
5.1.1. Strategi Koalisi Parpol Pengusung SK-HD	87
5.1.2. Strategi Tim Pemenangan SK-HD	110
5.1.3. Keterlibatan Elite Politik Berpengaruh Syahrul Yasin Limpo,Rusdi Masse dan Tenri Olle YasinLimpo	125



BAB VI PENUTUP	137
6. 1.Kesimpulan	137
6. 2.Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	143



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram.....	30
Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran.....	54



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Model-Model Teori Koalisi.....	27
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 1.3 Daftar nama-nama informan .....	57
Tabel 1.4 Perbandingan Kursi di Parlemen Partai Usungan.....	83
Pasangan Calon di Takalar	
Tabel 1.5 Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Takalar .....	84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana UUD Republik Indonesia tahun 1945<sup>1</sup>.

Pemilu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pemilu diselenggarakan dua kali yaitu pemilu untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyat di parlemen, dan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden yang akan duduk sebagai eksekutif. Hal ini berlaku hingga di tingkat daerah, yaitu dengan memilih kepala daerah pemilihan gubernur/wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil

serta pemilihan walikota dan wakil walikota. Sebagaimana dalam

---

<sup>1</sup>-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”



Pasal 18 Ayat 4 perubahan kedua UUD 1945<sup>2</sup> menegaskan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Pemilihan Umum tahun 2004 merupakan eksperimen demokrasi Indonesia baru. Pemilu 2004 merupakan pemilu kedua setelah Presiden Soeharto mundur, meskipun demikian pada pemilu kedua ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam banyak hal dengan pemilu 1999. Hal ini karena pemilu 2004 merupakan pemilu pertama setelah amandemen ke-4 UUD 1945. Melalui amandemen struktur politik Indonesia dirubah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi proses rekrutmen elit politik.<sup>3</sup>

Beberapa perubahan penting dalam amandemen yang berkaitan dengan pemilu adalah dalam hal mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut konstitusi 1945 hasil amandemen ke-4, pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konstitusi mengamanatkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilu.

Perubahan terjadi juga pada pola rekrutmen kepala daerah yang efektif dilakukan setelah pemilu nasional 2004. Pemilihan kepala daerah

ur dan bupati/walikota) juga dilakukan secara langsung mulai



<sup>2</sup> -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”  
<sup>3</sup> www.perpurnas.go.id., pada Tanggal 10 Januari 2018 pukul 10.47

tahun 2005 sesuai otonomi daerah dan pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum<sup>5</sup>, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu , sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pemilihan Kepala Daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Kemudian pada tahun 2011 diterbitkan Undang-Undang baru mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu<sup>6</sup>. Di dalam undang-undang ini istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Dinamika politik di Indonesia pada tahun 2015 telah menunjukkan beberapa perubahan yang signifikan, yakni diadakannya “Pilkada Serentak” diseluruh daerah di Indonesia. Pilkada yang sebelumnya dilakukan secara sendiri-sendiri (tidak serentak) bertransformasi menjadi pilkada serentak.



---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom.  
<sup>5</sup> Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu  
<sup>6</sup> Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar pada berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2017 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2017. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2017 merupakan yang kedua kalinya setelah dilaksanakan pada tahun 2015. Pelaksanaan pemungutan suara telah digelar secara serentak pada tanggal 15 februari 2017. Pemilihan digelar di 7 (tujuh) provinsi, 18 (delapan belas) kota dan 76 (tujuh puluh enam) kabupaten atau khusus bagi daerah yang akhir masa jabatan kepala dan wakil kepala daerahnya berakhir antara juli 2016 dan desember 2017<sup>7</sup>. Salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak 15 februari 2017 adalah Kabupaten Takalar.

Pilkada langsung adalah perhelatan pemilu yang dilakukan di daerah untuk memilih gubernur dan wakil Gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati. Momentum ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Setiap pasangan calon yang bertarung dalam pilkada langsung dapat melalui

\_\_\_\_\_orseorangan maupun partai politik berdasarkan Undang-Undang  
\_\_\_\_\_0 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah

www.Liputan6.com, Pada Tanggal 10 Januari 2018, Pukul 11.00



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 39<sup>8</sup> menjelaskan bahwa peserta pemilihan adalah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai Politik; dan/atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Persyaratan untuk mengusung pasangan calon diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 40<sup>9</sup> menjelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.  
<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.



Pasangan calon yang maju melalui jalur partai politik dapat diusung oleh satu partai sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan tetapi jika satu partai tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengusung calon dapat bergabung dengan partai lain untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Gabungan partai politik atau yang lebih dikenal dengan koalisi parpol yang mengawal pasangan calon untuk mendaftarkan pasangan calonnya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

Secara umum koalisi parpol di Indonesia terdiri dari koalisi Indonesia hebat dan koalisi merah putih. Koalisi Indonesia hebat dan koalisi merah putih pada prakteknya partai politik di daerah dalam mengusung calonnya berkoalisi secara acak dan tidak tersekat pemetaan antara parpol yang tergabung dalam KIP dan KMP. Acaknya koalisi memperlihatkan pengusungan kepala daerah tidak mempersoalkan visi,platform, ideologi parpol atau kandidat akan tetapi lebih bertemu pada sudut kepentingan jangka pendek yaitu memenangkan kandidat tertentu dan memperoleh kekuasaan.

Koalisi parpol yang amat cair juga terjadi di daerah, Pilkada kabupaten Takalar adalah salah satu daerah yang melaksanakan pilkada langsung di tahun 2017. Pasangan calon yang bertarung di pilkada Takalar adalah

in Burhanuddin Baharuddin dengan Natsir Ibrahim serta pasangan  
ri Kitta dengan Achmad Dg Se're.



Syamsari Kitta dengan Achmad Dg Se're, diusung oleh dua partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem. Partai yang menyatakan diri untuk ikut bergabung mendukung pasangan calon tersebut yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alasan koalisi partai ini mendukung Syamsari Kitta - Achmad Daeng Se're adalah pasangan ini merupakan figur pemimpin yang mempunyai moral dan komitmen untuk masyarakat Takalar<sup>10</sup>.

Pasangan calon Burhanuddin Baharuddin dengan Natsir Ibrahim diusung oleh 8 partai antara lain Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, Partai Demokrasi Indonesia Pembaharuan. Adapun Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, hanya sebagai Partai Pendukung bagi bakal pasangan calon Burhanuddin Baharuddin dengan Natsir Ibrahim.

Gambaran di atas dapat dilihat bahwa koalisi partai yang mengusung pasangan calon Burhanuddin Baharuddin dan Natsir Ibrahim merupakan koalisi partai yang besar dibandingkan dengan koalisi Syamsari Kitta dan Ahmad Daeng Se're yang hanya di dukung oleh 3 partai. Hal tersebut membuat pasangan petahana lebih diunggulkan pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Takalar.

Kabupaten Takalar dengan Jumlah Anggota DPRD sebanyak 30 kursi, minimal dukungan kursi dari partai politik atau gabungan partai politik

---

.Rusdi Masse: Duet SK-HD Punya Moral, Komitmen dan Tulus.<http://sulselku.com>



sebanyak  $30 \times 20 / 100 = 6$  Kursi. Dan untuk syarat pencalonan dengan jumlah seluruh suara sah dari hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014 yaitu  $167.734 \times 25 / 100 = 41.934$  suara sah.

Hal yang menarik setelah pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi calon terpilih adalah SK-HD yang didukung oleh koalisi partai kecil. Ketimpangan hasil pemungutan suara dengan besarnya koalisi menjadi suatu hal yang tidak lazim. Penetapan calon terpilih menurut Keputusan KPU Kabupaten Takalar berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten, hasilnya tidak dapat diterima oleh pasangan calon Burhanuddin Baharuddin - Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) yang menetapkan pasangan calon Syamsari Kitta- Achmad Daeng Se're (SK-HD) sebagai calon terpilih pada Pilkada Takalar dengan meraup 88.113 suara (50,58%) sedangkan petahana hanya meraup sebanyak 86.090 suara (49,42%)<sup>11</sup>. Selisih perolehan suara yaitu 2023 suara (1,16%)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh) dari suara sah.

Petahana menganggap bahwa ada indikasi KPU tidak melaksanakan

a dengan baik dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk

\_\_\_\_\_  
: KPU Kabupaten Takalar, 2018



diproses lebih lanjut. Pada akhirnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka ditetapkanlah SK-HD sebagai calon terpilih<sup>12</sup>.

Pencapaian yang telah diperoleh pasangan usungan koalisi PKS dan NASDEM memberikan kejutan karena mampu merubah prediksi banyak pihak, terutama mereka yang memandang bahwa pasangan SK-HD sulit mengimbangi pasangan petahana Burhanuddin Baharuddin- Natsir Ibrahim yang diusung koalisi partai besar. Prediksi calon terpilih Pilkada Takalar sebelum pencoblosan tidak memihak SK-HD berdasarkan hasil survey lembaga survey yang melakukan penelitian dan analisis pengamat lebih mengunggulkan pasangan petahana memiliki peluang besar untuk terpilih kembali karena realitasnya elektabilitas dan popularitas petahana berada pada posisi pertama sebelum masuk tahapan pilkada sampai masa tenang.

Hasil pra penelitian penulis di lapangan yang menjadi faktor pertimbangan petahana diunggulkan karena pasangan ini diusung oleh koalisi partai politik besar bahkan pasangan petahana sempat menguat menjadi pasangan tunggal di Pilkada Takalar jika partai Nasdem tidak memberikan rekomendasi ke SK-HD. Alasan kedua, selama petahana menjadi Bupati Takalar lima tahun terakhir, prestasinya cukup bagus tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat dan keduanya mampu

meningkatkan keharmonisannya dengan memilih maju kembali berpasangan



untuk kedua kalinya meskipun jelang deklarasi sempat diwacanakan tidak sepaket.

Beberapa faktor petahana kalah dan SK-HD mampu mengimbangi petahana yaitu koalisi` partai besar yang menjadi pengusung dan pendukungnya tidak mampu dikelola dengan baik. Ada kecenderungan ketidakharmonisan di internal partai pendukung tersebut penyebabnya karena ada partai yang diistimewakan sedangkan partai yang lain tidak diistimewakan hal ini saat Indira Chunda Thita SYL sebagai impretase PAN tidak diberi ruang berorasi dan lebih mengistimewakan Partai Golkar kemudian beberapa partai pendukung lain seperti Partai PDI P dan Demokrat tidak solid memenangkan petahana karena lebih memilih berangkat ke Jakarta mensosialisasikan calon partainya di Pilgub Jakarta.

Faktor penyebab lainnya menurut hasil wawancara penulis dengan Tim Pemenangan Burhanuddin Baharuddin – Natsir Ibrahim mereka terlena dengan hasil survey dengan pencapaian dan elektabilitas dan popularitasnya sebelum masa tenang padahal disisi lain pasangan SK-HD tren dukungannya dari beberapa kali survey mengalami kenaikan dan massif memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk meningkatkan keterpilihannya terutama dalam meyakinkan pemilih yang belum menentukan pilihan saat itu.

faktor yang menyebabkan kandidat yang didukung oleh koalisi partai kecil mengalahkan kandidat yang didukung oleh koalisi partai politik



besar pada Pilkada Takalar adalah strategi koalisi partai politik pengusung pasangan Syamsari Kitta - Achmad Daeng Se're pada Pilkada Takalar Tahun 2017, Strategi tim kemenangan Syamsari Kitta – Achmad Daeng Se're pada Pilkada Takalar Tahun 2017, Keterlibatan elite berpengaruh Syahrul Yasin Limpo, Rusdi Masse, dan Tenri Olle Yasin Limpo.

Berdasarkan fokus dari permasalahan tersebut diatas maka penulis akan mengkaji Kemenangan Syamsari Kitta – Achmad Daeng Se're pada Pilkada Takalar Tahun 2017.

## **1. 2 Rumusan Masalah**

Setelah pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi pemenang adalah SK-HD yang didukung oleh koalisi partai politik kecil mengalahkan petahana yang didukung oleh koalisi partai politik besar. Ketimpangan hasil pemungutan suara dengan besarnya koalisi menjadi sesuatu hal yang tidak lazim. Berdasarkan fokus dari permasalahan tersebut maka penulis kemudian merumuskan mengapa kandidat yang diusung oleh koalisi partai politik kecil mengalahkan kandidat yang diusung oleh koalisi partai politik besar pada Pilkada Takalar Tahun 2017 ?



### 1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana ditetapkan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

Menggambarkan dan menganalisis calon yang didukung oleh koalisi partai politik pada pemilihan kepala daerah.

### 1. 4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun empiris, yaitu:

#### 1. Manfaat Akademik

- a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai calon yang didukung oleh koalisi partai politik pada pemilihan kepala daerah.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik dan perkembangan keilmuannya khususnya pada kajian kepemiluan.

#### 2. Manfaat Empiris

- a. Memberikan bahan rujukan/referensi kepada masyarakat yang berminat dalam memahami calon yang didukung oleh koalisi partai politik pada pemilihan kepala daerah.
- b. Memberikan bahan masukan/input terkait calon yang didukung oleh

alisi partai politik pada pemilihan kepala daerah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2. 1 Pemahaman tentang Partai Politik

Partai Politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan<sup>13</sup>.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>14</sup>

Menurut Sigit Pamungkas partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideology tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam pemilu<sup>15</sup>. Dari defenisi tersebut, beberapa hal dapat dijelaskan sebagai

---

<sup>13</sup>Miriam Budiarto.2013.Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta: PT Gramedia Pustaka  
l.403  
l.404  
Pamungkas, Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia, Institute for Democracy and  
e, Yogyakarta, 2011,



berikut. Pertama, partai politik merupakan sebuah organisasi. Sebagai sebuah organisasi, partai politik merupakan entitas yang bekerjanya berdasarkan prinsip –prinsip tertentu seperti adanya kepemimpinan dan keanggotaan, devisionalisasi dan spesifikasi, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan control serta adanya aturan main yang mengatur perilaku anggota dan organisasi. Kedua, partai politik merupakan instrumen perjuangan nilai atau ideologi.

Partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi. Nilai atau ideologi itu diyakini kebenarannya oleh kolektivitas individu yang tergabung dalam organisasi itu.

Pada kerangka partai politik nilai atau ideologi itu memiliki beberapa fungsi.<sup>16</sup>Pertama, pada tingkat paling minimal sebagai corak atau ciri khas yang membedakan dirinya dengan partai lain. Kedua, menjadi pisau analisis partai dalam memahami realitas. Terakhir, ideologi berfungsi sebagai pemandu perilaku partai dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Partai politik setidaknya memainkan salah satu atau semua hal dari fungsi ideologi tersebut. Jika sebuah partai mendeklarasikan dirinya sebagai partai sosialis, nasionalis, atau agama maka klaim nilai atas nilai atau ideologi tersebut setidaknya menjadi identitas, alat analisis, atau penuntun

han perilaku individu dan organisasi partai.



Ketiga, perjuangan partai adalah melalui penguasaan struktur kekuasaan. Dengan demikian partai sesungguhnya adalah berorientasi pada kekuasaan, yaitu untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Yang harus dicatat adalah kekuasaan tersebut direbut dalam rangka implementasi nilai atau ideologi yang mengikat partai, bukan semata-mata mengejar kekuasaan. Sebagai entitas yang berorientasi kekuasaan, partai politik dibedakan dengan organisasi sosial atau pun ekonomi. Dengan demikian, perilaku partai politik tidak ditujukan pada aktivitas-aktivitas sosial atau belas kasihan (charity) dan juga bukan organisasi yang berorientasi pada perburuan keuntungan ekonomi.

Partai politik adalah entitas yang terspesialisasi atau memang dilahirkan untuk meraih, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Partai adalah alat untuk memperoleh kekuasaan, bukan yang lainnya. Takdir partai politik adalah untuk berburu kekuasaan, tentu saja dengan sejumlah etika yang membatasinya. Hanya saja, ketika kekuasaan sudah diraih, kekuasaan yang diperoleh oleh partai politik tidak semata-mata diorientasikan untuk kekuasaan. Kekuasaan itu kemudian diorientasikan untuk kebaikan bersama<sup>17</sup>.

Partai-partai politik didefinisikan oleh sebuah fungsi sentral (mengisi politik dan memegang kekuasaan pemerintahan), dampak pada



sistem politik lebih luas dan dan lebih kompleks<sup>18</sup>.Partai-partai konstitusional yang berjalan dalam sebuah konteks kompetisi pemilihan cenderung digambarkan sebagai benteng demokrasi, adanya partai-partai semacam itu sering dipandang sebagai salah satu tanda sebuah sistem demokrasi yang sehat. Di sisi lain,partai-partai rezim yang menikmati sebuah monopoli dalam kekuasaan politik umumnya digambarkan sebagai perangkat-perangkat manipulasi dan control politik.

Kontroversi berlanjut di seputar dampak yang luas daripada partai politik. Sebagai contoh, Thomas Jefferson dan para bapak pendiri yang lain dari konstitusi AS dan di masa modern, para pendukung dari partai-partai anti partai menggambarkan partai-partai dalam sudut pandang yang sangat negatif, memandang mereka sebagai salah satu sumber perselisihan dan perpecahan politik.

Beberapa fungsi partai politik yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo ada 4 fungsi yaitu : sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik<sup>19</sup>.



---

Heywood.Politik.Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2014 hal.399  
Budiardjo.2013.Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta: PT Gramedia Pustaka  
l.405

Sejumlah fungsi umum dari partai dapat diidentifikasi. Fungsi-fungsi yang utama adalah sebagai berikut<sup>20</sup>

a. Perwakilan

Perwakilan sering dipandang sebagai fungsi utama dari partai-partai. Menunjuk pada kemampuan dari partai-partai untuk merespon dan mengartikulasikan pandangan dari para anggota maupun dari para pemilih. Dalam bahasa teori sistem, partai-partai politik merupakan alat-alat input utama yang menjamin bahwa pemerintahan memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat luas.

Fungsi perwakilan yang paling baik dilaksanakan, sebagian akan mengatakan hanya dapat dilaksanakan, dalam sebuah sistem yang terbuka dan kompetitif yang mendorong partai-partai untuk merespon pilihan-pilihan masyarakat. Para teoretikus pilihan rasional, mengikuti Anthony Downs (1957) Dalam bukunya Andrew Heywood Politik, menjelaskan proses ini dengan mengemukakan bahwa pasar politik paralel dengan pasar ekonomi, dimana para politisi secara esensial bertindak sebagai para pengusaha yang berusaha mencari suara, berarti partai-partai berperilaku sangat mirip dengan perusahaan-perusahaan.

Kekuasaan bergantung pada para konsumen, yaitu para pemilih.

ekonomi ini, akan tetapi dapat dikritik dengan dasar bahwa partai berusaha membentuk atau menggalang opini publik, dan juga

---

Heywood.Politik.Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2014 hal.399



merespon opini publik, bahwa gambaran tentang para pemilih sebagai para konsumen yang berpengetahuan, rasional dan berorientasi isu masih dipertanyakan dan bahwa rentang pilihan dari konsumen (atau para pemilih) sering kali sangat terbatas.

b. Pembentukan dan rekrutmen elite

Partai-partai dari segala jenisnya berperan dalam menyediakan bagi negara para pemimpin partai politik mereka<sup>21</sup>. Perkecualian dari ini adalah partai-partai yang secara efektif, merupakan ciptaan dari politisi yang sangat kuat dan digunakan sebagai kendaraan politik untuk memobilisasi dukungan, seperti misalnya Partai forza Italia dari Silvio Berlusconi, yang dibentuk pada 1993 tetapi kemudian diubah namanya menjadi Partai Rakyat Merdeka pada 2009, dan Partai Rusia Bersatu dari Vladimir yang dibentuk pada 2001.

Para politisi mencapai jabatan atau kekuasaan dengan bermodalkan kedudukan mereka di partai mereka; para kontestan pemilihan presiden biasanya adalah para pemimpin partai, sementara dalam sistem-sistem parlementer pemimpin dari partai terbesar di dalam majelis normalnya akan menjadi perdana menteri. Kabinet dan jabatan-jabatan kementerian lain biasanya di isi oleh figur-figur senior dari partai, meskipun perkecualian terdapat pada sistem-sistem presidensial seperti misalnya di AS, yang

memungkinkan penunjukan para menteri yang non partai.



400

Kasus yang banyak terjadi adalah partai-partai menjadi kawah candradimuka bagi para politisi yang membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dan memberl mereka sebagian bentuk struktur karier, meskipun sebagian dari itu bergantung pada keberuntungan dari partai tersebut. Batasan-batasan yang diberikan partai-partai pada jabatan-jabatan pemerintahan dapat dikritik karena menjamin bahwa para pemimpin politik ditarik dari sekelompok kecil orang-orang berbakat, figur-figur senior dari segelintir partai-partai besar. Di AS akan tetapi pembatasan ini telah dilemahkan oleh meluasnya penggunaan pemilihan-pemilihan primer, yang menurunkan daya kendali dari sebuah partai atas proses pemilihan dan pencalonan para kandidat.

## 2. 2 Teori Koalisi Partai Politik Ala William Riker

Koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama, atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah atau “penggunaan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit”<sup>22</sup>.

Perilaku Politik Definisi Menurut Para Ahli dan Faktor yang mempengaruhi Menurut William Riker dalam bukunya *The Theory of Political*

..., koalisi politik dimaknai sebagai, “[...] *three-or-more-person game*,

mungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*, Institute for Democracy and e, Yogyakarta, 2011,



*the main activity of the players is to select not only strategies, but partners. Partners once they become such, then select a strategy*"<sup>23</sup>. Pada saat para rekanan (partner) ini bergabung, dan bekerjasama hanya dengan sejumlah aktor lain, dan bertarung menghadapi aktor-aktor lainnya di luar mereka, setiap koalisi pada dasarnya mencari pengaruh langsung di antara aktor-aktor tanpa adanya mediasi yang berbentuk material oleh karenanya bersifat politis.

Pengikatan koalisi dilakukan para actor dengan tawar menawar menciptakan berbagai kemungkinan kontrak politik tentang bagaimana bentuk koalisi maupun pemutusan kerja samanya. Penyatuan motif dan ketrampilan berpolitik kemudian menjadi titik penting dalam koalisi, sebab dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik diantara partner koalisi agar semua pihak memperoleh hasil maksimal.

Pada sistem multipartai dimana kekuatan politik terdistribusi kedalam banyak simpul partai, terutama sekali sistem pemerintahan parlementer kebutuhan untuk membangun koalisi adalah kondisi yang tidak terhindarkan. Pada sistem parlementer ketika tidak ada partai mayoritas maka pembentukan pemerintahan atau kabinet hanya dapat melalui koalisi diantara partai-partai yang ada. Meskipun demikian, pada presidensialisme terjadinya



---

Riker. 1962. *The Theory of Political Coalition*. New Haven & London: Yale University

koalisi partai juga bukan sesuatu yang muskil. Nalar "*the winner take all*" pada presidensialisme beberapa segi menjadikan koalisi tidak diperlukan, tetapi dalam beberapa kasus terutama presidensialisme multipartai, terjadi koalisi diantara partai-partai<sup>24</sup>.

Ada 4 (empat) arena dalam koalisi partai<sup>25</sup>. Pertama, koalisi electoral, yaitu aliansi melalui mana partai politik setuju untuk tidak bersaing melawan satu dengan yang lainnya dengan pandangan untuk maksimalisasi representasi bersama mereka. Kedua, koalisi legislatif, yaitu kesepakatan antara dua atau lebih partai untuk mendukung sebuah undang-undang atau sebuah program tertentu. Ketiga, koalisi pemerintahan, yaitu kesepakatan formal diantara dua atau lebih partai yang melibatkan distribusi lintas partai portofolio menteri. Terakhir, koalisi besar atau pemerintahan nasional, yaitu meliputi seluruh partai-partai utama, tetapi mereka biasanya dibentuk hanya ketika ada krisis nasional atau bahaya ekonomi.

Studi tentang koalisi ini dibutuhkan untuk mengerti keterikatan aktor-aktor politik dalam membangun suatu kolektivitas dengan melacak alasan tindakan tersebut dilakukan cara pembentukan kerja sama, pertimbangan serta berbagi sumber daya yang dimiliki.



---

mungkas, Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia, Institute for Democracy and e, Yogyakarta, 2011, hal.78

### a. Sumber Daya Koalisi

Studi paling klasik tentang koalisi menempatkan besaran kekuatan partai (*size of party power*) sebagai sumber daya penentu terbentuknya koalisi partai. Pada perspektif ini, distribusi asimetrik sumber daya diantara partai-partai akan melahirkan hasil yang berbeda<sup>26</sup>.

Kemungkinan koalisi dibangun atas sejumlah asumsi sebagai berikut :

1. Anggota triad mungkin berbeda kekuatannya. Anggota yang lebih kuat dapat mengontrol anggota yang lebih lemah, dan akan berusaha melakukannya.
2. Setiap anggota triad mencari kontrol atas anggota yang lain. Kontrol atas dua yang lain lebih disukai daripada mengontrol satu lainnya. Kontrol atas satu yang lain dipilih daripada tidak ada yang dikontrol.
3. Kekuatan adalah bertambah. Kekuatan koalisi adalah setara dengan jumlah kekuatan dari dua anggota.
4. Formasi koalisi berlangsung dalam situasi triadik, dengan demikian ada suatu kondisi pra-koalisi di setiap triad. Setiap upaya yang dilakukan oleh anggota yang lebih kuat untuk memaksa anggota yang lebih lemah ke dalam penggabungan koalisi yang tidak menguntungkan akan memprovokasi pembentukan koalisi yang menguntungkan untuk

entang paksaan.

\_\_\_\_\_  
re Caplow dalam "A Theory of Coalition in The Triad" (1956) Dalam bukunya Sigit  
as Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia membuat simulasi kemungkinan  
i tiga kekuatan(triad) yang berbeda.



Ada 4 (empat) argumen teoritikal bagi terbentuknya sebuah koalisi<sup>27</sup>. Secara umum argumen ini mengatakan bahwa terbentuknya koalisi tidak semata-mata dibangun atas kalkulasi sumberdaya, tetapi ada dimensi-dimensi lain yang mendorong terbentuknya koalisi. Keempat argumen teoritik itu adalah sebagai berikut :

1. Teori Sumberdaya-Minimum (*Minimum –Resource Theory*) . Teori ini menekankan sumberdaya yang dibawa pemain koalisi. Diasumsikan pemain memaksimalkan pembagian keuntungan berdasarkan norma persamaan, yaitu pembagian keuntungan sama dengan besaran sumberdaya yang dibawa oleh pemain.

Pemain dengan sumberdaya terbesar boleh jadi menjadi pemain terlemah, sebaliknya pemain dengan sumberdaya terkecil dapat menjadi pemain yang paling penting. Koalisi yang terbentuk menghitung total sumberdaya sesuai dengan kebutuhan minimal agar menang. Misalnya A memiliki 40 suara, B mempunyai 30 suara, sedangkan C adalah 20 suara. Koalisi minimum yang dapat menang adalah koalisi antara B dan C.

2. Teori kekuatan minimum (*Minimum-Power Theory*). Teori ini menekankan pada perbandingan kekuatan relative pemain daripada

distribusi sumberdaya yang dimiliki. Daripada berbagi keuntungan dengan pemain dengan sumberdaya yang relative sama, pemain-

\_\_\_\_\_n dalam bukunya Sigit Pamungkas Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia



pemain lebih berharap berbagi keuntungan secara proporsional dengan pemain poros.

Koalisi akan ditentukan oleh pemain yang berada pada posisi kunci poros atau paling penting. Kekuatan pemain paling penting adalah kuantitas sumberdaya pemain tertentu yang dapat mengubah koalisi yang kalah menjadi koalisi yang menang. Pembagian keuntungan terbesar diperuntukkan untuk pemain paling penting, setiap pemain memiliki kesempatan yang sama meskipun sumberdaya yang dimiliki berbeda.

3. Teori anti kompetisi (*Anticompetitive Theory*). Dinyatakan bahwa sikap tentang kompetisi dan tawar menawar, perbedaan personalitas, dan factor-faktor lainnya akan memimpin pemain-pemain untuk membentuk koalisi yang lebih besar daripada koalisi ukuran minimum. Diprediksi koalisi akan membentuk resistensi sepanjang waktu, yaitu antar partner siapa yang paling penting dan solusi yang tidak ambigu tentang persoalan pembagian keuntungan.

Koalisi akan terbentuk diantara pemain yang memiliki sumberdaya yang sama adalah lebih utama, sebab perbedaan sumberdaya diantara pemain koalisi akan menimbulkan permasalahan pada distribusi

ntungan.



4. Sama sekali membingungkan/pilihan acak (*utter confusioun/ random choise*). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa banyak situasi koalisi yang tidak kondusif untuk dianalisis dan dihitung secara rasional. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan ini, formasi koalisi adalah terbaik dipahami esensinya sebagai proses pilihan acak. Banyak situasi koalisi yang terbentuk sebagai hasil peristiwa-peristiwa keberuntungan dan insidental.

#### **b. Motif Koalisi**

Jumlah partai mempengaruhi tujuan koalisi dan masing-masing aktor koalisi memiliki tujuan khusus<sup>28</sup>. Dalam sistem dua partai berkoalisi merupakan pengecualian. Koalisi dalam sistem dua partai biasanya terkait dengan situasi internal / eksternal yang membahayakan atau ketika dua partai tersebut menginginkan hal yang sama. Kemungkinan lain terjadinya koalisi dalam sistem dua partai adalah menyangkut koalisi isu-isu tertentu. Sementara itu dalam sistem multipartai koalisi tidak diperlukan ketika ada satu partai yang memiliki suara mayoritas mutlak. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus partai pemenang, lebih memilih berkoalisi dengan lainnya untuk membagi tanggung jawab kekuasaan, sebab koalisi dalam sistem multipartai memperkuat posisi partai di parlemen.

koalisi berfungsi memaksimalkan keuntungan, mementingkan satu beberapa aktor menganggap kemenangan lebih berarti daripada



lainnya.,dan ketika situasi tidak menguntungkan mereka keluar. Simulasi tiga aktor dengan distribusi sumberdaya yang berbeda, menyebutkan 3 (tiga) motif dalam sebuah koalisi<sup>29</sup>. Diasumsikan aktor-aktor koalisi adalah A, B, dan C, dengan sumberdaya yang dimiliki adalah A lebih besar daripada B, dan B lebih besar daripada C, tetapi penggabungan B dan C lebih besar daripada A ( $A > B > C$ ,  $A < B + C$ ). Berdasarkan simulasi itu, tujuan dari koalisi diantara ketiga aktor itu diantaranya adalah :

1. Mencari efisiensi (*seek efficiency*) biaya untuk keuntungan koalisi dengan bergabung dalam koalisi kekuatan minimum (*minimum winning coalition*).
2. Menjadi pemegang kontrol (*seek control*) dalam koalisi dengan bekerja sama atau bergabung dengan partner terlemah.
3. Mengamankan diri (*seek security*) dari beberapa situasi, yaitu berkoalisi dengan pemegang sumberdaya terbesar.

Menurut Hinckley, B efisien mengontrol C dan aman dengan memilih A tetapi tidak bisa memegang kontrol. Pemain A efisien dengan C, aman dengan B, dan dapat mengontrol keduanya. Dapat diartikan pula A mencari aman, B mencari penguasaan kontrol, dan C efisiensi, prediksi yang muncul koalisi antara B dan C, sedangkan anggota kongres/parlemen bisa mengejar tiga tujuan yang berbeda, tergantung personal mereka dan situasi pemilihan

memenangkan pemilihan kembali, membuat kebijakan publik yang memperbesar prestise dalam suatu institusi.

\_\_\_\_\_ dalam bukunya Sigit Pamungkas Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia.



Sementara itu Debus menyebutkan bahwa partai secara tipikal memiliki satu dari dua motif dalam berkoalisi<sup>30</sup>, yaitu : berorientasi pada kekuasaan (*office –oriented approaches*), atau berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approaches*). Pendekatan orientasi kekuasaan mengasumsikan bahwa partai semata-mata menaruh perhatian terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu mempertimbangkan kekuatan partai politik dalam parlemen.

Tabel 1 Model-Model Teori Koalisi

Teori Koalisi Buta Kebijakan	Teori Koalisi Berbasis Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi</li> <li>• Minimal winning coalition (William Riker)</li> <li>• Asumsi partai bertujuan “office seeking” (memaksimalkan kekuasaan)</li> <li>• Loyalitas peserta koalisi sulit dijamin</li> <li>• Sulit diprediksi, juga range ukuran jumlah partai sangat beragam</li> </ul>	<p>Menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan</p> <p>Minimal connected coalitions (Rober Axelrod)</p> <p>Asumsi partai bertujuan “<i>policy seeking</i>”(mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai)</p> <p>Loyalitas peserta koalisi secara minimal diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan</p> <p>Koalisi sangat gemuk dengan melibatkan partai-partai yang tidak perlu agar tujuan kebijakan mendapat dukungan mayoritas.</p>

Pendekatan orientasi kebijakan mengasumsikan bahwa partai sangat menaruh perhatian terhadap kebijakan, apapun rasionalitasnya, dan cenderung mengambil posisi programatik. Partai dalam satu atau lebih kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan koalisi.



Pendekatan orientasi kekuasaan, atau dikenal pula dengan istilah teori buta terhadap kebijakan (*policy blind theory*), pemain kunci dalam permainan koalisi adalah pemain dominan, yaitu satu yang termasuk dalam pemenangan koalisi daripada partai lain dalam parlemen. Pemain dominan itu adalah partai terkuat dalam parlemen.

### **c. Formasi Koalisi**

Koalisi antar partai sangat banyak macam dan derajatnya, secara garis besar dapat dibedakan koalisi sementara yang berulang-ulang dalam beberapa periode memungkinkan menjadi koalisi parlemen. Beberapa koalisi tidak permanen dan tidak terorganisasi. Koalisi temporer yang sederhana diambil berdasarkan kepentingan partai pada pemilu, untuk merongrong pemerintah atau untuk mendukungnya dari waktu ke waktu. Sedangkan aliansi yang permanen dan terorganisasi kuat terkadang bagaikan partai super.

Klasifikasi koalisi secara vertikal yaitu aliansi saat pemilihan, aliansi parlemen, aliansi pemerintah. Aliansi saat pemilihan dilakukan antar kandidat, aliansi parlemen antar anggota legislatif, dan aliansi pemerintah antar menteri. Tiga aliansi tersebut bisa terjadi bersamaan atau berdiri sendiri. Aliansi saat pemilihan bervariasi tergantung pada sistem pemilihan dan

an dengan tujuan aliansi itu sendiri., bisa melalui menawarkan calon  
; mendaftar atau bersama-sama mengusung satu calon, penunjukan



langsung, persetujuan yang mengaku pada kesepakatan bersama sesuai dengan sistem proporsional. Ketiga aliansi tersebut bisa tersirat atau eksplisit dalam ranah lokal maupun nasional.

Kelemahan aliansi secara tersirat bisa semanya mengalihkan suara untuk kandidat lain tanpa persetujuan voters. Jika salah satu partai melanggar kompromi maka aliansi tersebut tidak ada untungnya. Aliansi terbuka lebih efektif tetapi mempersulit partai itu sendiri. Kenyataannya aliansi tersirat lebih banyak dilakukan.

Relasi antara aliansi saat pemilu dengan aliansi di parlemen dan pemerintahan sangat kompleks. Aliansi di parlemen dan pemerintahan bisa terjalin tanpa harus ada koalisi saat pemilu. Misalnya saja dalam sistem proporsional partai-partai independen dalam pemilu, namun saat membentuk pemerintahan mereka berkoalisi. Solidaritas aliansi dalam pemilu lebih kecil daripada aliansi di parlemen atau pemerintah. Masing-masing partai mencoba menggantungkan tanggung jawab sebagai anggota koalisi apabila ada kebijakan yang kurang atau mengurangi kepopuleran. Tetapi ketika sistem pemilihan mengarahkan ke koalisi pemilu, tidak selamanya pada saat yang sama koalisi pemerintahan. Lebih mudah untuk memenangkan kursi daripada membagi kekuasaan dalam koalisi.

teori koalisi mengajarkan bahwa tidak semua partai layak untuk anggota rekanan dalam pembentukan cabinet koalisi .





antara partai A dan partai E menunjukkan kedekatan dari setiap partai terhadap suatu kutub ideologi.

*Minimal winning coalition* merupakan koalisi yang didasarkan pada maksimalisasi kekuasaan dengan mengabaikan partai yang tidak perlu. Spektrum ideologi partai tidak menjadi pertimbangan penting dalam model koalisi ini. Terjadi pada ABC, ADE, BCD, BE, dan CE. *Minimum size coalition* adalah koalisi yang dibangun oleh partai besar dengan partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas. Koalisi ini terjadi antara ADE. *Bargaining proposition coalition* adalah koalisi dengan jumlah partai yang berkoalisi paling sedikit. Koalisi terjadi antara BE, CE. *Minimal range coalition* adalah koalisi berdasarkan kedekatan pada kecenderungan ideologis. Koalisi akan terjadi pada ABC, BCD, dan CE. *Minimal connected winning coalition* adalah koalisi yang terjadi antara partai-partai yang memiliki persambungan orientasi kebijakan. Koalisi akan terjadi antara ABC, BCD, CDE. *Policy-viable coalition* adalah koalisi yang terjadidiantara partai-partai yang secara spesifik memang memiliki kepedulian yang sama berkaitan dengan kebijakan. Koalisi ini terjadi antara ABC, BCD, CE.

Kabinet dapat dibentuk dengan *winning coalition* tetapi partai-partai memilih meluaskan koalisi mereka. Menurut Riker hal tersebut dilakukan

pertama, mempertimbangkan ketidakpastian seberapa loyal koalisi dan legislator bersama partai ini di masa depan, kemudian ada



tambahan partai yang menambah pendanaan yang mengubah struktur dan menjamin keberlangsungan kemenangan. Kedua, kebijakan berdasarkan teori-teori juga menjadi prinsip dalam perhitungan. Mengatur posisi kursi, termasuk alternatif-alternatifnya. Terakhir, kebijakan mempertimbangkan siapa yang memimpin koalisi, membawa dengan objektif agar semua partai bisa bergerak bersama dalam rezim demokrasi yang berkontak dengan ancaman dari dalam dan luar.

## 2. 3 Strategi Politik Ala Peter Schroder

Definisi strategi yang dalam Bahasa Inggris adalah *strategy*, adalah *plan indeed achieve a particular purpose* atau rencana yang diharapkan untuk meraih sebagian tujuan. Istilah strategi berasal dari bidang militer. Pemikiran strategi senantiasa dibutuhkan apabila sekelompok besar orang yang perlu dipimpin dan oleh karena itu membutuhkan orientasi. Hingga awal industry

Pengertian strategi hampir hanya terbatas pada makna militer. Baru sesudah itu kepemimpinan atas sejumlah besar orang diperlukan juga di bidang ekonomi. Sejak itu pengertian strategi memperoleh perluasan makna. Setelah itu terciptalah strategi perluasan yang diperlukan ke dalam kepemimpinan terencana atas orang-orang dalam suatu perusahaan. Sedikit

sedikit pengertian strategi makin diperluas ke berbagai aspek kat. Tentu saja pengertian ini juga diperluas ke bidang politik, karena



pergerakan massa dalam jumlah besar atau anggota partai politik dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan juga berlaku dalam bidang ini.

Strategi militer ini ada yang berasal dari zaman Julius Caesar dan Alexander Agung, dan bahkan sampai pada tulisan yang dibuat oleh Sun Tzu sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Sementara, kata strategi berasal dari Yunani yaitu *strategos*, yang terbentuk dari kata *statos* yang berarti militer dan *agos* yang berarti memimpin. Seiring berjalannya waktu, pengertian strategi makin diperhalus dan disesuaikan dengan kepentingan militer, tetapi kemudian juga disesuaikan dengan kepentingan bisnis dan politik.

Teori strategi menurut Arnold Steinberg adalah rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Menurut Carl Von Clausewitz perbedaan antara taktik dan strategi sebagai berikut: taktik adalah seni menggunakan “kekuatan bersenjata” dalam pertempuran untuk memenangkan peperangan dan bertujuan mencapai perdamaian. Rencana jangka tersebut adalah strategi. Dalam strategi ini tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik. Namun tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya. Jadi strategi adalah rencana untuk tindakan. Sedangkan penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya.<sup>32</sup>



drianus Pito dkk, 2006: 196-197 *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung : Penerbit 006.

Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan yaitu “kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandatnya dalam perolehan tambahan suara. Dalam sebuah kemenangan PEMILU bagi kandidatnya atau dalam mayoritas bagi suatu peraturan. Bagaimana kemenangan tersebut digunakan merupakan tujuan politik yang ada di balik kemenangan yang nampak.<sup>33</sup>

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita- cita politik<sup>34</sup>. Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita.

Sebuah penyerangan saja tidak cukup; yang terutama harus dicapai adalah kemenangan yang menguntungkan. Hal ini berarti tidak ada gunanya seseorang melakukan banyak penyerangan secara kecil - kecilan yang meskipun dapat dimenangkan namun tidak akan membawa keuntungan yang jelas. Lebih baik seseorang mempersiapkan diri yang berkenaan dengan tema pertempuran yang menentukan tentang hal yang jelas dapat memperlemah lawan atau dapat melumpuhkannya. Jadi yang dibahas disini



---

r Peter, 2004: 4 *Strategi Politik*, Jakarta: Friedrich-Noumann-Stiftung, 2004.  
hroder, *Strategi Politik* (Jakarta: FNS,2009), hal 5-6.

bukanlah kemenangan di sepuluh atau lebih medan pertempuran sampingan, melainkan kemenangan di medan pertempuran utama.

Medan pertempuran utama inilah yang dalam politik belum tentu ditentukan oleh kita atau lawan, melainkan seringkali ditentukan oleh pandangan masyarakat. Apabila keadaan tidak memungkinkan kita untuk memperoleh kemenangan, maka sebaiknya kita menutup celah sebanyak mungkin, agar setidaknya memperoleh kemenangan-kemenangan parsial. Dalam keadaan tertentu dapat diterapkan strategi gerilya, Perumusan strategi secara keseluruhan juga harus mencakup kemungkinan-kemungkinan untuk membuat variasi dan dengan demikian langkah kita tidak dapat diduga. Kejadian “kebetulan” yang direncanakan ini harus mengejutkan lawan dan membuatnya menjadi gamang / kehilangan keyakinan.

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan<sup>35</sup>. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.<sup>36</sup> Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk



---

na Pena. 2006. *Kamus Ilmia Populer*. Surabaya: Gitamedia Press, hal 448  
Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT . Gramedia Widiasarana,

mendapatkan dan mempertahankan sumber–sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

## 1. **Perencanaan Konseptual Strategi politik**

Sistematika 10 langkah strategi politik yaitu<sup>37</sup>

### 1. **Merumuskan Misi**

Perumusan menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup tiga elemen yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai.

Dalam sebuah strategi politik, misi dapat diartikan persetujuan atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu, dipilih sebagai kandidat. Dalam sebuah perencanaan karir politik, misi harus menyatakan untuk siapa strategi itu direncanakan. Dengan demikian misi dapat menetapkan suatu kerangka atau batasan. Misi harus mengidentifikasi jangka waktu, hingga kapan keseluruhan sasaran harus dicapai, dan misi tidak boleh dirumuskan secara terlalu optimis sehingga menjadi tidak realitis.



Shroder. *Strategi Politik*. Jakarta: FNS, 2009, hal 24-40.

## 2. Penilaian Situasional dan Evaluasi

Analisis situasi dan evaluasi membahas fakta - fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terealisasi.

### a. Pengumpulan Fakta

Pengumpulan fakta berarti pengumpulan fakta-fakta internal dan eksternal yang relevan. Fakta internal adalah fakta yang menyangkut organisasi sendiri. Fakta eksternal adalah fakta yang menyangkut para pekerja atau lingkungan di mana akan direalisasikan. Pembatasan antara fakta internal dan eksternal tidak terlalu mudah, tapi pembatasan dilakukan sebelum proses pengumpulan fakta dimulai, untuk menghindari munculnya kesalahpahaman. Fakta kompetitor atau pesaing adalah fakta yang berasal dari organisasi-organisasi, yang merupakan pesaing langsung dari organisasi kita sendiri. Fakta lingkungan adalah fakta yang berasal dari masyarakat yang akan dijalankan.

### b. Mengidentifikasi Kekuatan Dan Kelemahan

Fakta-fakta telah terkumpul, secara sistematis digolongkan dan ditimbang berdasarkan kadar relevansi, ukuran, kepentingan dan urgensi.

Setiap fakta diteliti untuk menentukan apakah fakta - fakta tersebut merugikan atau justru mengganggu pelaksanaan. Apabila sebuah fakta



mendukung, fakta ini menjadi kekuatan. Sebaliknya, apabila mengganggu pelaksanaan, ia akan menjadi kelemahan.

### **c. Analisis Kekuatan Dan Kelemahan**

Kekuatan dan kelemahan sudah diketahui, maka keduanya harus dievaluasi. Setelah mengelompokkan mereka berdasarkan kadar kepentingan, perlu untuk menetapkan apakah kita memiliki pengaruh terhadap kelemahan - kelemahan tersebut dalam arti dapat mengeliminir atau setidaknya menguranginya. Dalam menganalisa dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita, yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan dalam konteks perencanaan strategi politik dan mengamati lingkungan eksternal.

### **d. Umpan – Balik (*Feedback*)**

Setelah menganalisa kekuatan dan kelemahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Apabila analisa kekuatan dan kelemahan menunjukkan bahwa ada keuntungan strategis yang jelas sehingga kemenangan pasti dapat diperoleh, dan kelemahan cukup dapat dilindungi, maka tersebut memiliki kemungkinan untuk dapat dicapai.

## **3. Perumusan Sub - Strategi**

Sementara langkah penilaian situasional lebih menyibukkan diri dengan dan situasi masa lalu, fokus kita harus bergerak maju ke depan perumusan sub - strategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut



menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi.

**a. Menyusun Tugas - Tugas**

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, lahirlah tugas - tugas yang harus diselesaikan. Tugas -tugas tersebut adalah meneliti kelemahan kita yang harus dieliminir, memberikan pertahanan dengan cara menutupi, mengalihkan perhatian yang harus dibangun, setelah itu menelaah kekuatan kita untuk menyerang lawan dan jika lawan menunjukkan kelemahan yang tidak berhubungan dengan kekuatan kita, maka kita harus membangun kekuatan ini.

**b. Merumuskan Strategi**

Pertama harus memilih isu-isu yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan. Isu - isu ini hendaknya berupa isu atau argumen yang membawa keuntungan yang jelas. Lingkungan di mana sebuah isu dijalankan memainkan peranan yang penting dalam penentuan isu dan memusatkan kekuatan serta semua penyerangan hanya satu isu dalam waktu tertentu saja.

**c. Mengevaluasi Strategi**

masing - masing strategi yang dipilih untuk menyelesaikan tugas saling melengkapi. Mereka harus saling cocok, baik di tingkat sub -



sub strategi maupun dalam strategi menyeluruh. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi - strategi yang dipilih setelah strategi itu dirumuskan.

#### **4. Perumusan Sasaran**

Setelah sasaran diputuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit - unit taktis dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan kelemahan sendiri juga ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus dapat dicapai dan tidak boleh menjadi ilusi belaka. Tujuan sudah dirumuskan, masing - masing strategi harus direalisasikan dan dijalankan. Tujuan ini masing - masing harus dibagi ke dalam unit taktis yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan. Karena itu, kuantitas, kualitas, jangka waktu dan tanggung jawab harus ditetapkan setelah tujuan dirumuskan.

#### **5. Target Image**

Strategi untuk kegiatan kehumasan atau Public Relations (PR) dirumuskan dan diimplementasikan di tingkat "PR", setelah keputusan diambil "citra yang diinginkan" (target image) ditetapkan. Target image menggambarkan citra yang diharapkan, yang hendak dicapai setelah



dijalankannya rangkaian pekerjaan kehumasan yang panjang dalam kelompok target. Target image ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan

## **6. Kelompok - Kelompok Target**

Kelompok target adalah kelompok - kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting untuk pencapaian misi. Kelompok ini perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Kelompok ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis, khususnya tujuan taktis, dan melalui analisa citra yang diinginkan (target image). Apabila kelompok target telah didefinisikan, fondasi untuk implementasi strategi yang komunikatif ditetapkan. Fondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrumen-instrumen kunci.

## **7. Pesan Kelompok Target**

Kelompok target yang telah dibahas diatas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat dikomunikasikan secara khusus dengan masing - masing kelompok target, dan tidak untuk semua

kelompok target yang ada. Perlu diperhatikan bahwa pesan yang diterima masing kelompok target tidak boleh saling bertentangan. Perluasan



pesan kelompok target merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir masa kampanye, untuk memberikan janji tertentu kepada kelompok pemilih tertentu.

## **8. Instrumen - Instrumen Strategi**

Pemilihan instrumen kunci terutama berkaitan dengan aksi - aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrumen - instrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Untuk itu ada syarat bahwa kelompok yang dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu, karena setiap kelompok target hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu. Pemilihan instrumen - instrumen kunci yang akan digunakan sekaligus menghasilkan keputusan - keputusan penting yang berhubungan dengan sumber daya untuk mengimplementasikan strategi serta efektivitas kampanye. Keputusan ini, beserta kelompok target yang dipilih menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan strategi.

## **9. Implementasi Strategi**

Dalam pengimplementasikan strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategi dilakukan terlebih dahulu perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis, perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan

instrumen kunci. Setelah itu baru lah peraturan untuk implementasi strategi ditetapkan. Dalam mengimplementasikan strategi politik, faktor manusia



menjadi signifikan untuk tiga aspek yaitu pimpinan politik, pimpinan partai yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan. Hubungan antara ketiga pihak ini, kuantitas, kualitas, pendidikan, motivasi dan etika merupakan syarat awal bagi keberhasilan implementasi strategi. Sementara dalam bidang operasional, syarat awal untuk keberhasilannya tergantung pada prinsip - prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya.

## 10. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Elemen yang pertama adalah prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Elemen yang kedua adalah prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri.

Setelah itu dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, yakni *Strength, Weakness, Opportunities, Threats* yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sementara SWOT membatasi diri pada penilaian situasi dan perumusan strategi yang bergerak lebih jauh pada evaluasi strategi dan terutama pelaksanaannya.<sup>38</sup>

Langkah strategis yang utama, selain mengukur diri dengan analisis SWOT, adalah pengumpulan informasi secara objektif. Hal ini

utama untuk mengidentifikasi para pesaing dan bisa di dapat dari

ter Scrooder. 2009. *Strategi Politik*. Jakarta: FNS, hal 11-13.



informasi dari kubu pesaing, spionase, analisis survei, analisis media, penjelasan dari aliansi pesaing. Selain itu, juga perlu secara jelas mengetahui aturan main yang tertuang dalam produk perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Dalam hal ini strategi politik sangat penting bagi para calon Eksekutif untuk memperebutkan kursi kekuasaan Eksekutif dalam mendekati rakyat. Oleh karena itu idealnya para calon Eksekutif menggunakan cara high level politics yang mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bersama untuk meraih kekuasaan. Sifat - sifat yang diharapkan anggap penting dan harus dimiliki oleh seorang politikus adalah dapat dipercaya, memiliki pandangan ke depan, kompeten dalam bidangnya, pantang mundur, dapat memperjuangkan kepentingan dan dekat dengan masyarakat.

Dalam rangka kemenangan Pemilu bukanlah hal yang mudah dan sederhana, disebabkan banyaknya tahapan yang harus diikuti dan dilalui, serta Parpol sebagai partai peserta Pemilu harus mampu mendorong para Calon Eksekutifnya menuju kemenangan . Strategi politik adalah seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan, baik dalam kontestasi Pemilu Eksekutif (Pemilukada Gubernur, Bupati / Walikota, maupun dalam Pemilu Presiden.



Alfian. 2008. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal

Reformasi yang terjadi dimana proses politik menjadi lebih berdinamika, yang diwarnai oleh pertarungan antar partai yang sangat terbuka, hingga akhirnya dibutuhkan adanya strategi politik dalam memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik, dengan menggunakan berbagai pendekatan termasuk di dalamnya memperhatikan isu politik yang akan dijual kepada kelompok pemilih, memperhitungkan kekuatan sendiri, dan mengamati kemampuan partai pesaing yang menjadi rival politik.

## **2. 4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini , diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dominggus Nicodemus Kaya , Mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Politik UGM, dengan judul: Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam sistem Kepartaian Luralis :Studi identifikasi strategi koalisi PKS , Partai Karya Peduli Bangsa, dan PKPI dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku.

Penelitian ini mengkaji strategi koalisi PKS , Partai Karya Peduli Bangsa, dan PKPI dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku.



Hasil penelitian Strategi pertama, ketiga partai menjalin komunikasi dan membentuk koalisi secara terbatas, yaitu hanya semata-mata untuk kepentingan mengusung pasangan kandidat, yang disejajarkan dengan tipe koalisi kemenangan minimal seperti disampaikan Arend Lijphart. Untuk mewujudkan koalisi tersebut, partai memiliki alasan politis dan alasan etis. Alasan politis adalah pra kondisi yang harus tersedia antara lain kesamaan titik pandang, dukungan kondisi basis-basis kepartaian, sosok figur, keterbatasan variasi isu yang bisa dikemas. Di samping itu, terdapat kepentingan mendapatkan kompensasi politik baik jangka pendek maupun jangka panjang. Alasan etis ialah mengawal pelaksanaan pilkada hingga mencapai hasil yang optimal. Strategi kedua, partai mengupayakan mendapatkan kandidat yang paling layak untuk diusung, dengan menjalankan fungsinya sebagai nominating candidates melalui upaya menjaring, mengidentifikasi, dan menentukan pasangan kandidat yang akan dinominasikan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Subhan, Mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Politik UNAIR, dengan judul : Koalisi Partai Politik (Studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan koalisi partai politik dari pemerintahan Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarno Putri.



Penelitian ini mengkaji perubahan koalisi partai politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan koalisi partai politik, berimplikasi

pada terjadinya pergeseran kepemimpinan nasional dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Wakil Presiden Megawati Soekamoputri. Terselenggaranya Pemilu multi partai tahun 1999, secara minimal telah menempatkan Indonesia pada jalur demokratisasi yang benar dalam pergulatan masa transisi menuju sistem politik yang demokratis.

Hasil penelitian PDI-P yang hanya mampu mendapatkan 30 persen suara. Semua ini memberikan peluang bagi partai politik untuk melakukan koalisi. Proses terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, tentu tidak bisa dilepaskan dari terbentuknya koalisi beberapa partai politik (PPP, PKB, PAN, PBB, PK dan Golkar). Sedangkan faktor yang mendorong terjadinya koalisi yang mendukung Abdurrahman Wahid adalah ketakutan dan kelompok-kelompok Islam yang termanifestasikan pada elite-partai politik Islam ataupun yang berbasis massa Islam, jika Megawati yang terkenal nasionalis terpilih untuk menjadi Presiden dalam Sidang Umum MPR 1999.



TABEL 1.2. Penelitian Terdahulu

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Dominggus Nicodemus Kaya, Mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Politik UGM	Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam sistem Kepartaian Luralis :Studi identifikasi strategi koalisi PKS , Partai Karya Peduli Bangsa, dan PKPI dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku	Penelitian ini mengkaji strategi koalisi PKS , Partai Karya Peduli Bangsa, dan PKPI dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku. Hasil penelitian Strategi pertama, ketiga partai menjalin komunikasi dan membentuk koalisi secara terbatas, yaitu hanya semata-mata untuk kepentingan mengukung pasangan kandidat, yang disejajarkan dengan tipe koalisi kemenangan minimal seperti disampaikan Arend Lijphart. Untuk mewujudkan koalisi tersebut, partai memiliki alasan



politis dan alasan etis. Alasan politis adalah pra kondisi yang harus tersedia antara lain kesamaan titik pandang, dukungan kondisi basis-basis kepartaian, sosok figur, keterbatasan variasi isu yang bisa dikemas. Di samping itu , terdapat kepentingan mendapatkan kompensasi politik baik jangka pendek maupun jangka panjang. Alasan etis ialah mengawal pelaksanaan pilkada hingga mencapai hasil yang optimal. Strategi kedua, partai mengupayakan mendapatkan kandidat yang paling layak untuk diusung, dengan menjalankan fungsinya sebagai nominating candidates melalui



		upaya menjaring, mengidentifikasi, dan menentukan pasangan kandidat yang akan dinominasikan.
Subhan, Mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Politik UNAIR	Koalisi Partai Politik (Studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan koalisi partai politik dari pemerintahan Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarno Putri	Penelitian ini mengkaji perubahan koalisi partai politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan koalisi partai politik, berimplikasi pada terjadinya pergeseran kepemimpinan nasional dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Wakil Presiden Megawati Soekamoputri.  Terselenggaranya Pemilu multi partai tahun 1999, secara minimal telah menempatkan Indonesia pada jalur demokratisasi yang benar



dalam pergulatan masa transisi menuju sistem politik yang demokratis. Hasil penelitian PDI-P yang hanya mampu mendapatkan 30 persen suara. memberikan peluang bagi partai politik untuk melakukan koalisi. Proses terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, tentu tidak bisa dilepaskan dari terbentuknya koalisi beberapa partai politik (PPP, PKB, PAN, PBB, PK dan Golkar). Sedangkan faktor yang mendorong terjadinya koalisi yang mendukung Abdurrahman Wahid adalah ketakutan dan kelompok-kelompok Islam yang termanifestasikan pada elite-elite partai politik Islam ataupun



		yang berbasis massa Islam, jika Megawati yang terkenal nasionalis terpilih untuk menjadi Presiden dalam Sidang Umum MPR 1999.
--	--	---

Dari kedua penelitian di atas jika dilakukan perbandingan menunjukkan adanya persamaan dan perbedaaan dengan kajian penelitian penulis. Adapun perbedaannya pada lingkup kajian penelitian. Penelitian terdahulu yang pertama mengkaji tentang strategi koalisi partai politik dan Penelitian terdahulu yang kedua mengkaji tentang perubahan koalisi partai politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan koalisi partai politik tersebut Sedangkan penulis mengkaji tentang kandidat yang diusung oleh koalisi partai politik kecil mengalahkan kandidat yang diusung oleh koalisi partai politik besar dan faktor-faktor yang menyebabkan kandidat yang diusung oleh koalisi partai politik kecil mengalahkan kandidat yang diusung oleh koalisi partai politik besar pada pilkada.



## 2. 5 Kerangka Pemikiran

Sejatinya calon kepala daerah yang diusung oleh koalisi partai politik yang besar memberi peluang besar kepada calon yang diusung untuk memenangkan pilkada. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Calon yang diusung oleh koalisi partai politik kecil ternyata dapat memenangkan pilkada seperti yang terjadi pada Pilkada Takalar Tahun 2017. Oleh karena itu penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis kandidat yang diusung koalisi partai politik kecil mengalahkan kandidat yang diusung koalisi partai besar dan faktor yang menyebabkan kandidat yang diusung oleh koalisi partai politik kecil mengalahkan kandidat yang diusung oleh koalisi partai politik besar pada Pilkada Takalar Tahun 2017 .

Adapun faktor yang menyebabkan kandidat yang diusung koalisi partai politik kecil mengalahkan kandidat yang diusung koalisi partai politik besar adalah strategi koalisi partai politik pengusung pasangan Syamsari Kitta – Achmad Daeng Se're pada Pilkada Takalar Tahun 2017, strategi tim pasangan Syamsari Kitta – Achmad Daeng Se're pada Pilkada Takalar Tahun 2017, keterlibatan elite berpengaruh Syahrul Yasin Limpo, Rusdi Masse dan Tenri Olle Yasin Limpo.



**Gambar 2 Skema Kerangka Pikir**

**Skema Kerangka Pikir**

